

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan variabel sektor jasa, investasi dan TPAK. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), DPMPTSP Sumatera Barat dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPJK). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear data panel dengan gabungan data *time series* dari tahun 2011-2021 dan *cross section* dari 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Model regresi yang digunakan dari hasil pengujian menggunakan software Eviews 12 yaitu *Random Effect Model* (REM). Berdasarkan hasil pengolahan dan pengujian data didapatkan pengaruh dari variabel yang digunakan yaitu dengan hasil sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 11 tahun dari periode 2011-2021 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, persentase dari tingkat kemandirian keuangan yang diperoleh dari 19 Kabupaten/Kota belum mencukupi standar yang mandiri bagi suatu daerah menurut pengklasifikasian dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hal tersebut dikarenakan rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat masih di bawah 25% yang artinya masih tergolong ke dalam kategori rendah. Sehingga membuktikan pendapatan daerah bergantung kepada pemerintah pusat dan hal pembiayaan dan keuangan daerah.
2. Sektor jasa memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Artinya semakin meningkat pendapatan dari sektor jasa akan mempengaruhi pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.
3. Investasi penanaman modal dalam negeri dan asing turut mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2021. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah investasi yang terdapat dalam daerah akan diikuti dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang berimplikasi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

4. TPAK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Peningkatan konsumsi barang dan jasa akan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga rasio kemandirian keuangan daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa saran yang diberikan sebagai sarana meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dibutuhkan peran pemerintah dalam menggali lebih dalam mengenai potensi-potensi daerah yang ada secara optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia, meningkatkan layanan jasa pemerintahan dan sektor-sektor perekonomian dalam lingkup jasa yang berkontribusi terhadap pemungutan atau pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga dapat terserap maksimal.
2. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus meningkatkan investasi bagi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan investasi kepada bidang usaha yang memiliki nilai ekonomis tinggi, dan pendapatan lain yang diterima dari bagi hasil pajak daerah seperti pajak cukai dan sumber penerimaan lainnya.
3. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah diperlukan masyarakat yang produktif dan aktif bekerja yang dicerminkan dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sehingga diperlukan peran masyarakat yang aktif dalam roda perekonomian daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.